

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jambi)

Edo Agus Pratama^{1*}, Sarah Sinadela², Gushendarto³

^{1,2,3}Universitas Jambi, Indonesia

*Corresponding Author: edomatematika67@gmail.com

Received: 21/01/2024 | Revised: 16/02/2024 | Accepted: 02/04/2024 | Published: 20/04/2024

Abstract: Jambi Province maintains an opinion from the government's financial reports, namely an unqualified opinion from the 2017-2022 BPK. However, there are several problems at the BPK in managing regional finances, namely the data presented is not appropriate, payment of teacher allowances, management of boss funds and inadequate management of regional receivables. This research aims to determine the effect of implementing accrual-based government accounting standards, human resource competency and internal control systems on the quality of financial reports in the Jambi Province OPD. This research uses quantitative research using primary data in the form of questionnaires using a 1-5 Likert scale and secondary data through documentation. The research method used was a purposive sampling method consisting of 21 OPDs with the number of respondents taken consisting of 3 people per OPD with a sample of 63 respondents. The data analysis method uses descriptive analysis and Structural Equation Modeling (SEM) - Partial Least Square (PLS) analysis using Microsoft Excel and SmartPLS 3 software. The results of the research show that (1) Implementation of accrual-based government accounting standards has a negative and insignificant effect on quality financial reports, (2) Human resource competency has a positive and insignificant effect on the quality of financial reports and (3) The internal control system has a positive and significant effect on the quality of financial reports. The suggestions given are for local governments to further improve employee understanding of accrual-based government accounting standards, provide training to local government officials on a regular and continuous basis and improve SOP's so that this will have an impact on the quality of financial reports getting better.

Keywords: *accrual government accounting standards, human resources competency, internal control system, quality of financial reports*

PENDAHULUAN

Organisasi sektor publik merupakan organisasi yang berorientasi pada keperluan publik, maka organisasi ini tidak bertujuan untuk mendapatkan laba. Organisasi sektor publik berkaitan erat dengan pemerintahan atau badan usaha yang mayoritas kepemilikannya berada di tangan pemerintah. Dimana pemerintah bertanggungjawab untuk memenuhi kesejahteraan di berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, perekonomian, keamanan, dan beberapa hal lainnya. Organisasi sektor publik

dalam praktiknya kini mulai diwarnai dengan munculnya fenomena untuk menguatkan akuntabilitas atas kinerja organisasi-organisasi publik tersebut, baik pusat maupun daerah. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban kejelasan atas segala aktivitas kepada pihak yang berkepentingan yang menjadi stakeholder (Mardiasmo, 2018).

Berkembangannya organisasi pemerintah di Indonesia baik dialami oleh pemerintah pusat maupun daerah, maka akan semakin meningkatnya tuntutan datang masyarakat untuk melaksanakan tata kelola pemerintah yang baik. Terdiri dari dua unsur pokok untuk mewujudkan pemerintahan yang baik yaitu transparansi dan akuntabilitas. Adanya transparan dan akuntabilitas ini dibutuhkan juga suatu pengembangan kebijakan akuntansi berupa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sehingga dapat mewujudkan laporan keuangan yang baik. Pengembangan kebijakan akuntansi SAP diharapkan dapat memberikan pedoman pokok dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah (Setiawan, 2017).

Fenomena kualitas laporan keuangan pemerintah salah satu menjadi topik untuk dikaji lebih lanjut. Kuatnya tuntutan atas kualitas laporan keuangan pemerintah menjadi perkembangan yang ada di Indonesia. Laporan keuangan pemerintah yang disusun harus tepat waktu dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Nurillah, 2014). Provinsi Jambi mempertahankan opini dari laporan keuangan pemerintah yaitu opini wajar tanpa pengecualian dari tahun 2017-2022 dari BPK. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen dan upaya DPRD serta manajemen Provinsi Jambi terus mendorong perbaikan pengelolaan keuangan dengan menjalankan dan menerapkan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik. Tetapi terdapat beberapa permasalahan yang di BPK dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu data-data yang disajikan tidak sesuai, pembayaran tunjangan guru, pengelolaan dana bos serta pengelolaan piutang daerah yang tidak memadai.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 mengenai akuntansi basis akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi pada saat kas di terima atau dibayarkan (Ayu, 2020). Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP berbasis akrual dimaksudkan untuk memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah daerah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh (Permana et al., 2020). Adanya SAP ini dapat mewujudkan kualitas laporan keuangan yang baik. Penelitian yang dilakukan Indry et al. (2024) yang menyatakan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Feni et al. (2023) yang menghasilkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Selain Standar Akuntansi Pemerintah, adapun faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan seperti Kompetensi Sumber Daya Manusia. Menurut Indrayani & Widiastuti, (2020) bahwa kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitas suatu individu atau perseorangan, instansi atau sebuah sistem, yaitu kemampuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi atau kewenangan untuk mencapai tujuan dengan cara yang efektif juga efisien. Kualitas laporan keuangan sangat

dipengaruhi oleh keberadaan sumber daya manusia. Dimana sumber daya manusia (SDM) dalam suatu organisasi merupakan aset yang berharga bagi organisasi itu sendiri. Keberhasilan suatu organisasi ditentukan dari kualitas orang-orang yang berada di dalamnya. SDM akan bekerja secara optimal jika organisasi dapat mendukung kemajuan karir mereka dengan melihat apa sebenarnya kompetensi mereka. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Festus et al. (2023) memperlihatkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nadya et al. (2023) dimana kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Selain kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal juga diperlukan dalam menghasilkan laporan keuangan yang baik. Menurut Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008, sistem pengendalian internal digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan kode etika dan melakukan penilaian risiko untuk mengendalikan lingkungan internal. Oleh karena itu jika penerapan sistem pengendalian internal yang kurang baik akan sangat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada suatu pemerintah, sehingga penerapan sistem pengendalian internal sangatlah penting pada pemerintah karena untuk menjaga kekayaan yang dimilikinya. Apabila Pemerintahan memiliki sistem pengendalian internal yang lemah, maka laporan keuangan yang dihasilkan tidak diyakini kewajarannya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Nurhayati, 2019). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mutoharoh (2023) memperlihatkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yurisdarti (2022) dimana sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tingkat eksplanasi penelitian berbentuk asosiatif. Objek dalam penelitian ini adalah Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, dan Kualitas Laporan Keuangan. Subjek dalam penelitian ini yaitu Organisasi Perangkat Daerah-Dinas Provinsi Jambi. Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah-Dinas yang berjumlah sebanyak 21 dinas di Provinsi Jambi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan metode purposive sampling yaitu responden yang diambil adalah kepala dinas, sekretaris dan kasubag keuangan pada seluruh OPD dinas dengan total responden sebanyak 63 responden. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan (Field Research) pada instansi tersebut. Instrumen yang digunakan adalah kuisioner untuk mengukur penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal dan kualitas laporan keuangan. Untuk memperoleh data dibuat pernyataan yang disusun dengan menggunakan skala likert 1-5. Masing-masing pernyataan berisi 5 pilihan jawaban. Kemudian dokumentasi, yaitu data laporan hasil pemeriksaan, Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian

Internal, Permendagri No. 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan, Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, buku-buku dan jurnal terkait. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif dan analisis Structural Equation Modelling (SEM)-Partial Least Square (PLS) dengan menggunakan software Microsoft Excel dan SmartPLS 3.

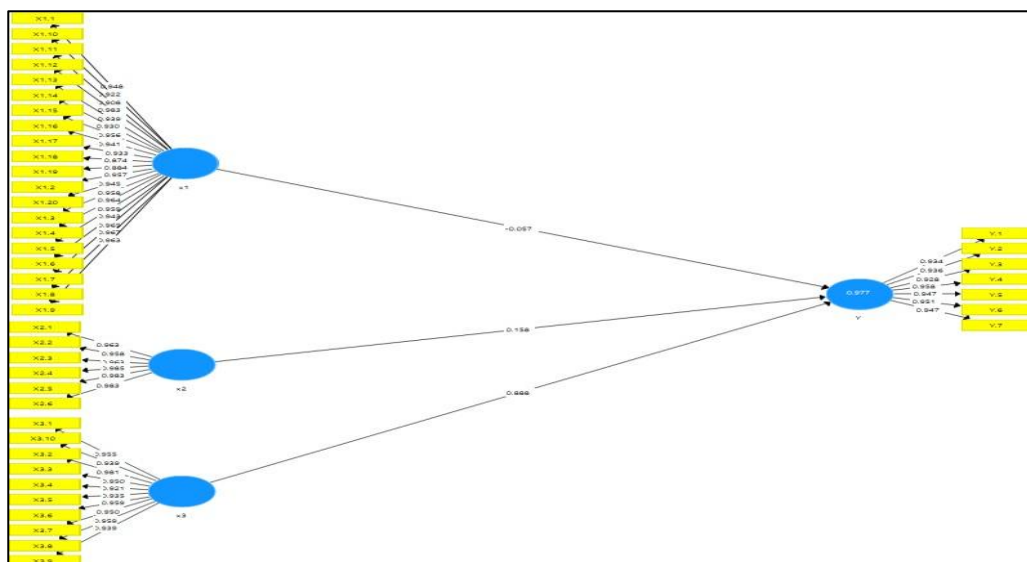
HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Outer Model

Teknik pengolahan data dengan menggunakan metode SEM berbasis PLS memerlukan 2 tahap untuk menilai fit model dari sebuah model penelitian (Ghozali, 2014). Salah satunya adalah analisis outer model. Analisis outer model digunakan untuk menguji pengukuran yang digunakan layak untuk dijadikan pengukuran yang valid. Ada beberapa indikator dalam analisis outer model diantaranya convergent validity, discriminant validity dan composite reliability.

Convergent Validity

Convergent validity dari sebuah model pengukuran dengan model reflektif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara item score atau component score dengan construct score pada Loading Factor yang dihitung dengan PLS. Ukuran reflektif dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,5 dengan konstruk yang ingin diukur. Berikut adalah gambar hasil kalkulasi model SEM PLS.



Gambar 2. Skema Penelitian Struktural SEM-PLS Setelah diolah

Hasil pengolahan dengan SmartPLS 3 dapat dilihat pada gambar 2 nilai outer model antara konstruk dengan variabel sudah memenuhi *convergent validity* karena indikator memiliki nilai validitas diatas 0,5.

Discriminant Validity

Uji discriminant validity menggunakan nilai cross loading. Suatu indikator dinyatakan

memenuhi discriminant validity apabila nilai cross loading indikator pada variabelnya adalah yang terbesar dibandingkan dengan variabel lainnya (ghozali, 2014). Berikut adalah nilai cross loading pada masing-masing indikator :

Tabel 1. Cross Loading

	x1	x2	x3	Y
X1.1	0,948	0,931	0,931	0,918
X1.2	0,957	0,948	0,953	0,947
X1.3	0,958	0,947	0,941	0,922
X1.4	0,964	0,954	0,955	0,944
X1.5	0,959	0,953	0,960	0,948
X1.6	0,943	0,936	0,945	0,939
X1.7	0,965	0,950	0,949	0,937
X1.8	0,967	0,964	0,961	0,944
X1.9	0,963	0,960	0,959	0,950
X1.10	0,922	0,905	0,903	0,888
X1.11	0,908	0,896	0,891	0,877
X1.12	0,983	0,981	0,982	0,971
X1.13	0,939	0,933	0,934	0,932
X1.14	0,930	0,936	0,913	0,907
X1.15	0,956	0,952	0,948	0,934
X1.16	0,941	0,937	0,931	0,923
X1.17	0,933	0,937	0,937	0,945
X1.18	0,874	0,865	0,853	0,831
X1.19	0,884	0,868	0,863	0,856
X1.20	0,945	0,926	0,917	0,908
X2.1	0,948	0,963	0,951	0,936
X2.2	0,952	0,958	0,946	0,943
X2.3	0,960	0,963	0,953	0,942
X2.4	0,984	0,985	0,980	0,970
X2.5	0,971	0,983	0,966	0,963
X2.6	0,972	0,983	0,968	0,960
X3.1	0,957	0,960	0,955	0,953
X3.2	0,985	0,980	0,981	0,966
X3.3	0,940	0,930	0,950	0,943
X3.4	0,916	0,915	0,921	0,897
X3.5	0,931	0,924	0,935	0,929
X3.6	0,945	0,945	0,959	0,952
X3.7	0,942	0,938	0,950	0,943
X3.8	0,935	0,946	0,959	0,943
X3.9	0,922	0,924	0,939	0,923
X3.10	0,908	0,911	0,939	0,925
Y.1	0,925	0,918	0,929	0,934
Y.2	0,920	0,930	0,928	0,936

Y.3	0,931	0,928	0,944	0,928
Y.4	0,934	0,931	0,944	0,958
Y.5	0,928	0,934	0,931	0,947
Y.6	0,906	0,903	0,920	0,951
Y.7	0,912	0,917	0,924	0,947

Berdasarkan data Tabel 1 diketahui bahwa masing-masing indikator pada variabel penelitian memiliki nilai cross loading terbesar pada variabel yang dibentuknya dibandingkan dengan nilai cross loading pada variabel lainnya. Berdasarkan hasil yang diperoleh tersebut, dapat dinyatakan bahwa indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini telah memiliki discriminant validity yang baik dalam menyusun variabelnya masing-masing.

Selain mengamati nilai cross loading, discriminant validity juga dapat diketahui melalui metode lainnya yaitu dengan melihat nilai Average Variant Extracted (AVE) untuk masing-masing indikator dipersyaratkan nilainya harus $> 0,5$ untuk model yang baik (ghozali, 2014).

Tabel 2. Average Variance Extracted (AVE)

	Average Variance Extracted (AVE)
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (X1)	0,889
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2)	0,888
Sistem Pengendalian Internal (X3)	0,946
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0,901

Berdasarkan Tabel 2 diketahui nilai AVE variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal dan kualitas laporan keuangan $> 0,5$, maka dinyatakan bahwa setiap variabel telah memiliki *discriminant validity* yang baik.

Composite Reliability

Composite reliability merupakan bagian yang digunakan untuk menguji nilai reliabilitas indikator-indikator pada suatu variabel. Suatu variabel dapat dinyatakan memenuhi *composite reliability* apabila memiliki nilai *composite reliability* $> 0,6$ (ghozali, 2018). Berikut nilai *composite reliability* dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini :

Tabel 3. Composite Reliability

	Average Variance Extracted (AVE)
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (X1)	0,983
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2)	0,994
Sistem Pengendalian Internal (X3)	0,991
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0,989

Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa nilai *composite reliability* semua variabel

penelitian $> 0,6$. Hasil ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel telah memenuhi *composite reliability* sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi

Uji reliabilitas dengan *composite reliability* sebelumnya dapat diperkuat dengan menggunakan nilai *cronbach's alpha*. Suatu variabel dapat dinyatakan reliabel apabila nilai *cronbach's alpha* $> 0,7$. Berikut adalah nilai *cronbach's alpha* masing-masing variabel.

Tabel 4. Cronbach's Alpha

	Cronbach's Alpha
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (X1)	0,979
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2)	0,993
Sistem Pengendalian Internal (X3)	0,989
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0,988

Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa nilai *cronbach's alpha* masing-masing variabel penelitian $> 0,7$. Maka hasil ini menunjukkan masing-masing variabel penelitian telah memenuhi persyaratan reliabilitas yang tinggi.

Analisis Inner Model

Analisa Inner model yang mana menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan pada *substantive theory*. Analisis inner model dapat dievaluasi yaitu dengan menggunakan *R-square* untuk konstruk dependen, *Q-square* untuk *predictive relevance*, *F-Square* untuk menilai dampak relatif dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur *structural*.

Koefisien Determinasi/ R^2 (R-Square)

R-Square (R^2) menunjukkan kuat lemahnya pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel eksogen terhadap variabel endogen. Interpretasinya semakin tinggi nilai R^2 semakin baik model prediksi dari model penelitian yang dibangun. Menurut Ghazali & Latan (2015), nilai R-square sebesar 0.75; 0.50; dan 0.25 dapat disimpulkan bahwa model kuat; moderat; dan lemah.

Tabel 5. R-Square

	R-Square
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0,977

Berdasarkan tabel 5 di atas dapat dilihat bahwa nilai $R^2 = 0,977$, yang artinya variabel eksogen mempunyai pengaruh sebesar 97,7% terhadap variabel endogen yang diteliti. Sedangkan sisanya yaitu 2,3% merupakan faktor lain yang tidak terdapat pada penelitian ini. Pengaruh tersebut termasuk ke dalam kategori pengaruh moderat ($R^2 > 0,67$).

Relevansi Prediksi/ Q^2 (Q-Square)

Q-Square (Q^2) untuk mengukur seberapa baik nilai observasi yang dilakukan memberikan hasil terhadap model penelitian. Nilai Q-Square berkisar antara 0 sampai dengan 1. Nilai Q-square > 0 menunjukkan bahwa model penelitian adalah baik. Sebaliknya nilai Q-square < 0 menunjukkan bahwa model penelitian tidak baik. Ghazali & Latan (2015) menentukan kriteria kuat lemahnya model berdasarkan Q-Square

Predictive Relevance sebagai berikut: 0,35 (model kuat); 0,15 (model moderat); dan 0,02 (model lemah).

Tabel 6. *Q-Square*

	<i>Q-Square</i>
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0,977

Berdasarkan tabel 6 di atas dapat dilihat bahwa nilai $Q^2 = 0,977$, yang artinya estimasi model pada penelitian ini memiliki kapabilitas prediksi yang kuat ($Q^2 > 0,35$).

Ukuran Efek/ F^2 (F-Square)

F-Square (F^2) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai dampak relatif dari suatu variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap variabel yang di pengaruhi (endogen). Kriteria F-Square menurut (Juliandi, 2018) adalah Jika nilai = 0.02 → Efek yang kecil dari variabel eksogen terhadap endogen, Jika nilai = 0.15 → Efek yang sedang/moderat dari variabel eksogen terhadap endogen dan (3) Jika nilai = 0.35 → Efek yang besar dari variabel eksogen terhadap endogen.

Tabel 7. F-Square

	Kualitas Laporan Keuangan (Y)
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (X1)	0,002
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2)	0,016
Sistem Pengendalian Internal (X3)	0,652

Berdasarkan tabel 7 di atas dapat dilihat bahwa variabel standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai masing-masing 0,002 dan 0,016 yang artinya terdapat pengaruh kecil terhadap variabel kualitas laporan keuangan. Sedangkan variabel sistem pengendalian internal memiliki nilai 0,652 yang artinya terdapat pengaruh besar terhadap variabel kualitas laporan keuangan.

Path Coefficients dan p-values

Tingkat signifikansi yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebesar 5%. Apabila tingkat signifikansi yang dipilih sebesar 5% untuk menolak suatu hipotesis artinya nilai p-value $\geq 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak dan apabila nilai p-value $\leq 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Tabel 8. Nilai *Path Coefficients* dan p-values

Variabel	Path Coefficients	Status	p-value	Status
X1 -> Y	-0,057	Negatif	0,718	Tidak Signifikan
X2 -> Y	0,158	Positif	0,287	Tidak Signifikan
X3 -> Y	0,888	Positif	0,000	Signifikan

Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil dari penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa penerapan sistem akuntansi berbasis akrual berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas

laporan keuangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa yang menjadi acuan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yaitu PSAP 01 penyajian laporan keuangan; PSAP 02 laporan realisasi anggaran; PSAP 03 laporan arus kas; PSAP 04 catatan atas laporan keuangan; PSAP 05 akuntansi persediaan; PSAP 06 akuntansi investasi; PSAP 07 akuntansi aset tetap; PSAP 08 akuntansi konstruksi dalam pengerjaan; PSAP 09 akuntansi kewajiban; PSAP 10 koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan; PSAP 11 laporan keuangan konsolidasian; serta PSAP 12 laporan operasional.

Akuntansi berbasis akrual (accrual basic) memiliki kelebihan yang harus diketahui seperti lebih akurat dalam penggambaran keadaan keuangan suatu instansi serta mampu menjadi pertimbangan dan penilaian pada kinerja instansi atau perusahaan yang dimaksudkan. Namun beberapa instansi pemerintah baik itu dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat belum bisa menerapkan akuntansi basis akrual (accrual basic) ini seperti yang tertuang dalam PP nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual (accrual basic). Hal ini dikarenakan masih banyak dibutuhkannya persiapan dan kurangnya sosialisasi dari Pemerintah khususnya kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ataupun pegawai yang berhubungan langsung pada proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan akuntansi berbasis akrual (accrual basic).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Feni et al. (2023) yang menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Tetapi hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indry et al. (2024) yang menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil dari penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Menurut permendagri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan, karakteristik kompetensi untuk Pegawai Aparatur Sipil Negara selaku Sumber Daya Manusia yang bertugas di Pemerintahan ialah pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills) dan sikap perilaku (attitude).

Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting. Pengelolaan sumber daya manusia yang baik mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Kompetensi sumber daya manusia termasuk menjadi salah satu faktor pendorong kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari hasil pengolahan kuesioner diperoleh Tingkat kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dikarenakan sebagian besar latar belakang pendidikan kepala atau staf bagian keuangan berlatar belakang pendidikan diluar akuntansi, ekonomi dan manajemen sehingga pemahaman terkait penatausahaan laporan keuangan belum memadai, pemahaman tentang standar akuntansi pemerintahan yang baru masih belum mapan dan peran pembinaan melalui

audit internal yang kurang (belum independen).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nadya et al. (2023) yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Tetapi hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Festus et al. (2023) yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil dari penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Adapun unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian internal.

Pengendalian internal telah memenuhi fungsinya dalam hal memberikan keyakinan yang memadai tentang kualitas laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta efektivitas dan efisiensi operasional. Pengendalian internal merupakan faktor yang signifikan mempengaruhi laporan keuangan. Peningkatan sistem pengendalian internal dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Integritas data yang akurat dan konsisten merupakan tanggung jawab utama suatu organisasi dalam melaksanakan pengendalian internal. Selain itu, keakuratan penginputan dan posting data keuangan merupakan hal yang sangat mendasar dalam menjamin kualitas penyajian laporan pertanggungjawaban suatu organisasi. Adanya sistem otorisasi dan pembatasan akses terhadap segala bentuk pemrosesan transaksi oleh pihak yang berwenang akan menjamin data keuangan dalam suatu organisasi tetap aman. Implementasi formulasi dalam Penyusunan kebijakan pengendalian internal yang sehat diperlukan sebagai penunjang terlaksananya pengendalian internal dalam suatu organisasi. Laporan keuangan berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan masyarakat sebagai pelaku yang harus sejahtera sesuai dengan kualitas penyajian laporan Keuangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mutoharoh (2023) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Tetapi hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuriswanti (2022) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan analisis data melalui pembuktian terhadap hipotesis maka kesimpulan yang dapat diambil adalah (1) Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, (2) Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dan (3) Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Adapun saran yang diberikan adalah (1) Untuk mengimplementasikan PP No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, disarankan kepada pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan pemahaman pegawai



atas standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, (2) Sebaiknya pemerintah daerah memberikan pelatihan-pelatihan kepada aparatur pemda secara rutin dan berkesinambungan agar pegawai memiliki kualitas yang baik sehingga akan berdampak pada kualitas laporan keuangan yang semakin baik dan (3) Dalam sistem pengendalian internal yang ada pada pemerintahan, sebaiknya Standard Operating Procedure (SOP) yang sudah ada lebih ditingkatkan lagi dan selalu memperbaiki SOP sesuai dengan perkembangan serta membukukannya ketika ada perubahan untuk menjadikan SOP sebagai alat bekerja dan mencapai tujuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, P. C., & Kusumawati, N. P. A. (2020). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, kompetensi sumber daya manusia dan pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar. *Widya Akuntansi dan Keuangan*, 2(1), 113–126. <https://doi.org/10.32795/widyaakuntansi.v2i1.55>
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2019). *Dasar-dasar manajemen keuangan* (Edisi ke-4). Jakarta: Salemba Empat.
- Feni, P., Muhammad, R., & Choirul, A. (2023). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, sistem pengendalian internal dan pengawasan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan di SKPD Kabupaten Bantul. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 2(6), 485–497. <https://doi.org/10.56799/jceki.v2i6.1734>
- Festus, R. K., Arlan, T., & Riyans, A. (2023). Quality of regional government financial reports: The effect of internal control, quality of human resources, and implementation of the accrual basis. *Jurnal Akuntansi Value Relevance*, 1(3), 98–111. <http://journal.feb-uniyap.id/index.php/vrja>
- Ghozali, I. (2014). *Structural equation modeling: Metode alternatif dengan partial least square (PLS)* (Edisi ke-4). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). Partial least square: Konsep, teknik, dan aplikasi menggunakan program SmartPLS 3.0. *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Ida, B. A. G., & Edy, S. (2023). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, kompetensi sumber daya manusia, dan pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 14(3), 824–829. <https://doi.org/10.23887/jimat.v14i03.64893>
- Indrayani, D. K., & Widiastuti, H. (2020). Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel moderasi. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 1–16.
- Indry, F., Enjelia, B., Lidya, N., Ory, B., & Diana, S. (2024). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dengan sistem pengendalian internal pada SKPD Kota Kupang. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(1), 1–14. <http://jurnal.jomparnd.com/index.php/jk>
- Ismunawan, & Septyani, N. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan (studi empiris pada koperasi di Boyolali). *Jurnal Penelitian Teori*

- & *Terapan Akuntansi (PETA)*, 5(2), 107–121.
<https://doi.org/10.51289/peta.v5i2.453>
- Juliandi, A. (2018). *Structural equation model partial least square (SEM-PLS) dengan SmartPLS*. Sumatera Utara: USU.
- Kiranayanti, E., & Adi, E. (2016). Pengaruh sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan pemahaman basis akrual terhadap kualitas laporan keuangan daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(2), 1290–1318.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Maryana, H., Sukarmanto, E., & Nurhayati. (2018). Pengaruh penerapan prinsip-prinsip good corporate governance terhadap kualitas laporan keuangan (studi kasus pada BUMN di Kota Bandung). *Prosiding Akuntansi*, 4(2), 701–707.
- Mutoharoh, & Ifada, L. M. (2023). Improving the quality of local government financial reporting through the impact of internal control system with human resource competencies as a moderator. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 13(2), 301–315. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jrak/article/view/25375>
- Nadya, V., Asep, K., & Raden, D. H. (2023). Pengaruh tingkat kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, dan efektivitas sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sumedang. *Journal of Finance, Entrepreneurship, and Accounting Education Research*, 2(2), 120–131. <https://ejournal.upi.edu/index.php/fineteach>
- Nurhayati, Y., Aprianto, R., & Anggraini, R. (2019). Pengaruh akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara. *Jurnal Akuntanika*, 5(1), 54–61.
- Nurillah. (2014). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD), pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada SKPD Kota Depok). *Diponegoro Journal of Accounting*.
- Kemendagri. (2013). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah*. Jakarta: Kemendagri.
- Kemendagri. (2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kemendagri.
- Kemendagri. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah*. Jakarta: Kemendagri.
- Permana, I. G. Y., & Widnyani, I. A. P. S. (2020). *Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual*. Sidoarjo: Zifatama Jawa.
- Rafika, A. (2020). *Determinasi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah*. Gorontalo: CV. Cahaya Arsh Publish & Printing.
- Rahayu, D. P. (2020). Pengaruh penerapan standar akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi kasus Dinas Perikanan Kabupaten Subang). *Prisma*, 1(71), 87–96. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma>
- Setiawan, I. W. N. (2017). Pengaruh akuntansi berbasis akrual, sistem pengendalian intern, dan motivasi kerja pada kualitas laporan keuangan. *Jurnal Akuntansi*, 21, 671–700.
- Udoyono, K. (2012). E-procurement dalam pengadaan barang dan jasa untuk

mewujudkan akuntabilitas di Kota Yogyakarta. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 3(1), 135–171. <http://journal.umy.ac.id/index.php/jsp/article/view/153>

Yusriwati, & Susanti, N. (2022). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, sistem pengendalian intern dan motivasi kerja terhadap kualitas laporan keuangan daerah (studi kasus pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Inhil). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 11(1), 34–44. <https://doi.org/10.30659/jai.11.1>